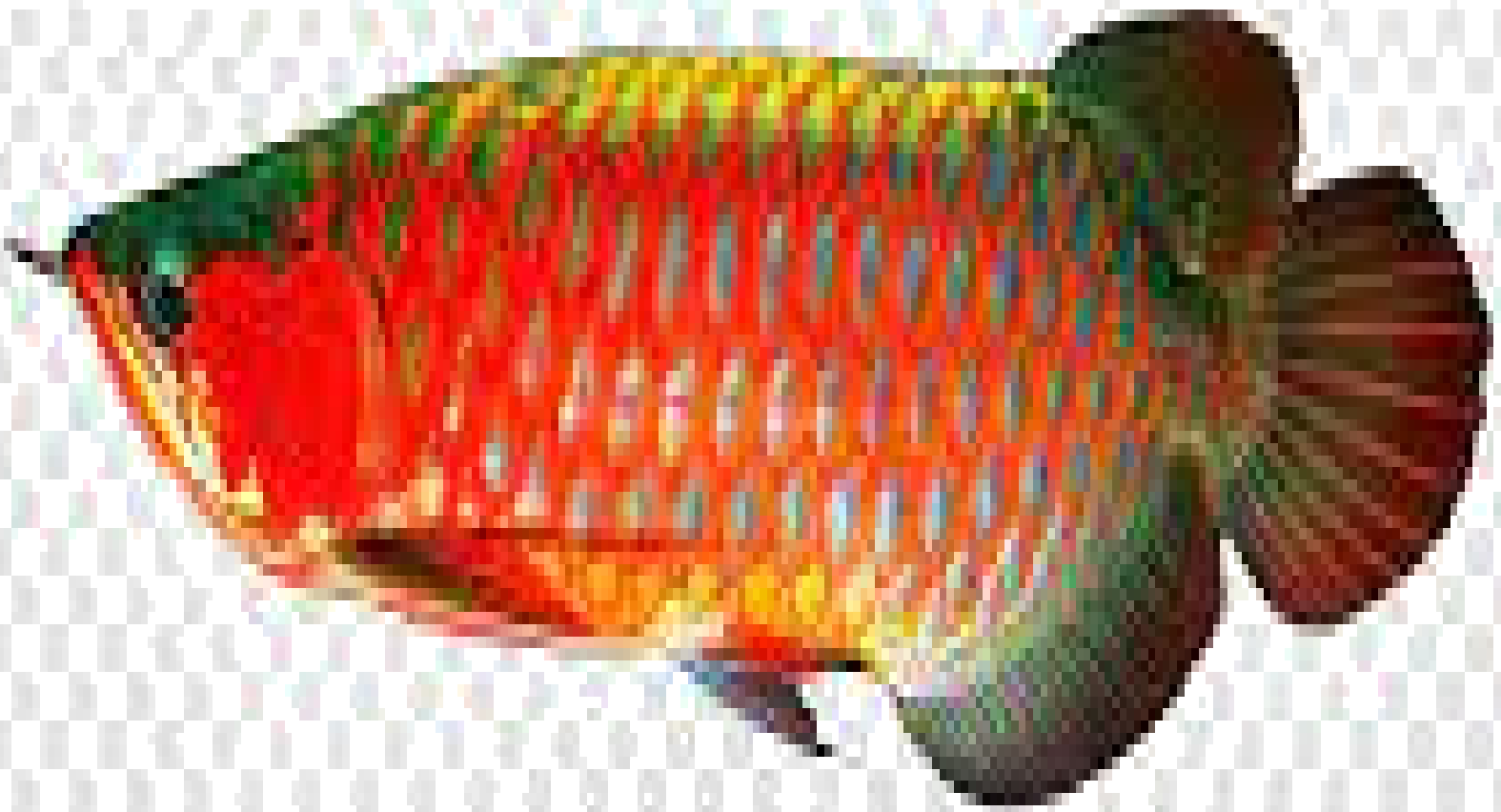




**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENJA - SKPD
KECAMATAN HULU GURUNG
TAHUN 2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika	9
BAB II EVALUASI HASIL RENJA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 ..	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Permasalahan dan Solusi	18
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	19
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	27
3.1 Tujuan	27
3.2 Sasaran	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	29
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN Matrik Kegiatan	

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA OPD merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang disusun setiap tahun anggaran sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program / kegiatan OPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai program kegiatan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 di bidang pemerintahan yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Hulu Gurung dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan

untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA SKPD Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Hulu Gurung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 dari 15 desa. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Hulu Gurung. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Hulu Gurung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Hulu Gurung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Hulu Gurung sebagai wujud dari kinerja tahun 2023 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Hulu Gurung sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 6), Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dan sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Hulu Gurung dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. RENJA SKPD Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Hulu Gurung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 dari 15 desa. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari

integritas moral dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Hulu Gurung. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Hulu Gurung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Kecamatan Hulu Gurung yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Hulu Gurung sebagai wujud dari kinerja tahun 2023 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.

2. Pembinaan Pemerintah Desa
3. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah
4. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat.
5. Penyusun Program dan Pembinaan administrasi .

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Kecamatan ;
- b. Seksi Pemerintahan ;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- d. Seksi Kesejahteraan ;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Personil
- b. Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2034;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
27. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
28. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kapuas Hulu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 di bidang pemerintahan yang disusun dalam bentuk matrik program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diharapkan RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini sekaligus sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2023.

Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah :

- 1.3.1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah dan terpadu;
- 1.3.2. Memberikan jaminan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah,
- 1.3.3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 menyangkut strategi dan arah kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan kecamatan ;
- 1.3.4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Permasalahan dan Solusi
- 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Hasil RENJA Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dana yang tersedia untuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan, adalah sebesar **Rp. 2.689.473.010,00** (Dua Milyar Enam Ratus Delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.671.580.945,00** (Dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau 99,33 % . Artinya rata-rata kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Hanya ada sebesar 0,67 % terjadi in efisiensi atau sebab lainnya.

Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 88.618.000,00** (Delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dan realisasinya sebesar **Rp 88.600.000,00** (Delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau **99,97** % . Sedangkan belanja langsung sebesar **Rp 2.600.855.010,00** (Dua Milyar Enam Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 2.582.980.945,00** (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau **99,31** % .

Pengukuran kinerja Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Untuk penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan sesuai dengan masing-masing kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Indikator - indikator tersebut

dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan target indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Berikut adalah realisasinya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2023
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12 bulan	100%	12 Bulan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	99 %
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	100%	1 Paket	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.0.07.01.0.00.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	4 Dokumen	100%	1 Paket	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2023
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	100%	100%
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
7.01.0.07.01.0.00.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	100%	1 Tahun	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	99,97 %
7.01.0.07.01.0.00.001.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	99 %
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Benda Pos)	150 Lembar	-	360 Lembar	360 Lembar	100%	250 Lembar	150 Lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2023
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet, PDAM dan PLN)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	93, 41 %
7.01.0.07.01.0.00.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	-	1 Tahun	100 %	100 %	12 Unit	3 Unit	100 %
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Service Komputer , Laptop dan Printer)	18 Unit	-	-	-	-	21 Unit	18 Unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun Berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2023	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2023
7.01.0.07.01.0.00.001.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 unit	3 Unit	1 Tahun	0 %	100 %	0 unit	-	0 %
7.01.0.07.01.0.00.0001	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									
7.01.0.07.01.0.00.003.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Hulu Gurung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Hulu Gurung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana
- Meningkatnya disiplin aparatur
- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
- Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
- Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan dan ketertiban .
- Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
- Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
- Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Hulu Gurung yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Hulu Gurung dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Hulu Gurung sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Kapuas Hulu. Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2022 pada Satuan Kerja Kecamatan Hulu Gurung memiliki pencapaian kinerja terealisasi sebesar **99,31** % dari Belanja Langsung.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Hulu Gurung
Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP Kecamatan	-	-	C	-	-	-	-	-	C	B	-
2	Nilai INDEKS Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	75,79	-	-	75,79	80	87,00	-

2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Selain beberapa capaian kinerja sebagaimana disebut sebelumnya, masih ditemui beberapa permasalahan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- Masih terdapat capaian kinerja indikator sasaran pada RENSTRA Kecamatan Hulu Gurung yang belum mencapai target. Namun keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja itu tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing OPD.
- Kualitas perencanaan yang ada sudah cukup baik, tetapi kebutuhan terkadang berkembang mengikuti perkembangan sehingga menyebabkan kesadaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan seringkali kali berubah di dalam proses penganggaran;

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

- Melaksanakan reviu terhadap target-target indikator kinerja sasaran pada rencana strategis Kecamatan Hulu Gurung.
- Meningkatkan koordinasi secara terarah kepada OPD untuk membina penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi hasil RENJA OPD setiap triwulan secara tepat waktu.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Hulu Gurung. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Hulu Gurung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Hulu Gurung masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Hulu Gurung, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha.

2. dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
5. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Hulu Gurung
6. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektoral.
7. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja;
9. Peningkatan monitoring, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan secara periodik untuk menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.
10. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem penganggaran.
11. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan OPD teknis dalam pelaksanaan pembangunan;

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Hulu Gurung berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Hulu Gurung. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Letak geografis Kecamatan Hulu Gurung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Hulu Gurung baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa. Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	100 %	2.802.802.621	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	100 %	2.802.802.621	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100 %	1.764.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100 %	1.764.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.095.285.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	2.095.285.021	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Honorarium Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan	100 %	71.940.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	71.940.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	2.806.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	2.806.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	100 %	2.504.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	2.504.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	13.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	13.750.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan sarana dan prasarana penerangan kantor	100 %	4.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	4.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan penyediaan Jasa Surat Menyurat (Benda Pos-Materai)	100 %	88.618.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Lembar	100 %	88.618.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	22.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	22.200.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	179.082.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	179.082.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	100 %	4.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit	100 %	4.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	10.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit	100 %	10.700.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	100 %	139.900.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	100 %	139.900.000	
7.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Kapuas Hulu	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100 %	139.900.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	100 %	139.900.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Hulu Gurung telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan. Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Hulu Gurung menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, adil tanpa mengabaikan prosedur kepada seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kecamatan Pengkadan dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam setiap aspek kehidupan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Pengkadan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya

4. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat
5. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi secara tertib dan lancar.
2. Terwujudnya tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
3. Tersedianya informasi tentang realisasi laporan keuangan .
4. Terpenuhi data profil Kecamatan Pengkadan yang akurat .
5. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan dapat berjalan dengan baik. Terpeliharanya bangunan dan halaman Kantor .
6. Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana kantor .
7. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan operasional Kecamatan .
8. Terlaksananya pelayanan jamuan rapat dan operasional secara optimal .
9. Terlaksananya program kegiatan yang sinergis
10. Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah .
11. Terpenuhi data perihal kinerja kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Hulu Gurung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Hulu Gurung dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Hulu Gurung adalah program tahunan Kecamatan Hulu Gurung yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kecamatan Hulu Gurung. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Hulu Gurung ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Hulu Gurung, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut :

Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN HULU GURUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Hulu Gurung				2.935.414.720				3.045.626.720
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	Kab. Kapuas Hulu	100 %	2.935.414.720	APBD		100 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	100 %	2.034.000	APBD		100 %	2.220.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD		100 %	2.010.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	100 %	2.198.108.120	APBD		100 %	2.169.867.174

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	73.980.000	APBD	-	100 %	86.840.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	100 %	2.122.000	APBD	-	100 %	1.788.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	100 %	2.946.000	APBD	-	100 %	2.398.200
7.01.01.2.05	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	100 %	12.000.000	APBD	-	100 %	17.402.000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan data seluruh aparatur	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	1.878.000
7.01.01.2.05.0009	Pendididkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan seluruh apartur	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	45.130.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pembinaan dan pengembangan SDA	Kab. Kapuas Hulu	100 %	64.942.000	APBD	-	100 %	29.656.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum PerangkatDaerah								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan sarana dan prasarana penerangan kantor	Kab. Kapuas Hulu	100 %	6.119.000	APBD	-	100 %	2.104.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan sarana dan prasarana pendukung kerja (ATK)	Kab. Kapuas Hulu	100 %	15.713.400	APBD	-	100 %	16.785.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan sarana dan prasarana rumah tangga	Kab. Kapuas Hulu	100 %	8.539.000	APBD	-	100 %	9.531.600
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Laporan Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu	-	6.000.000	APBD	-	100 %	6.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100 %	93.830.000	APBD	-	100 %	36.823.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Cakupan pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Kab. Kapuas Hulu	100 %	36.670.000	APBD	-	100 %	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan peralatan dan mesin	Kab. Kapuas Hulu	100 %	38.042.000	APBD	-	100 %	61.200.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kapuas Hulu		35.500.000	APBD	-	100 %	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan Jasa Surat Menyurat (Benda Pos-Materai)	Kab. Kapuas Hulu	100 %	1.500.000	APBD	-	100 %	1.500.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	100 %	23.158.000	APBD	-	100 %	28.452.540
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	100 %	154.122.200	APBD	-	100 %	215.160.260
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Cakupan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	3.760.000	APBD	-	100 %	7.520.000

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kapuas Hulu	100 %	7.140.000	APBD	-	100 %	5.150.000
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Nilai kepuasan atas layanan internal kantor	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	3.910.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.01.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Partisipasi Aktif Warga Masyarakat di Desa	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	3.100.000
7.01.01.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	64.050.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
7.01.01.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Wilayah Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuha nDana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Cakupan Seluruh Tokoh agama dan Tokoh mAsyarakat	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	2.610.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7.01.05.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunanggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunanggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan	Kab. Kapuas Hulu	100 %	-	APBD	-	100 %	1.834.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Hulu Gurung merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Hulu Gurung Selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023. Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Hulu Gurung Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Hulu Gurung diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Output Rencana Kerja Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Kerja Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Hulu Gurung. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA SKPD Kecamatan Hulu Gurung diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kecamatan Hulu Gurung serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Nanga Tenuai, Pebruari 2023

KAMPUK HULU GURUNG,



Drs. H. BAHARUDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19670718 199503 1 002